

Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berspektif Gender

Oleh:

Devi Novitasari (162020100041)

Dosen Pembimbing

Lailul Mursyidah, M.AP

**Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Juli 2023



Pendahuluan

■ Latar Belakang Masalah ■

Permasalahan yang membahas mengenai perempuan hingga kini seringkali dijadikan dibincangkan di Indonesia yaitu mengenai peran (kodrat) perempuan atau kesetaraan gender. Banyak orang telah mengetahui bahwasanya ada berbagai persepsi ataupun penghakiman yang dilakukan terhadap peran dari seorang perempuan. Hal tersebut seringkali dibahas oleh pihak-pihak tertentu dari berbagai aspek, terutama menyangkut aspek yang jika memiliki keterkaitan perempuan didalam sektor pembangunan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin

Sebenarnya, perempuan memang selalu memiliki kaitan dengan hal-hal atau isu menyangkut gender. Seperti yang terjadi di era modern sekarang ini, telah dikenal sebagai emansipasi Wanita. Perempuan sebagai manusia yang telah ada di lingkungan masyarakat atau sosial, menjadikan perempuan dianggap ideal oleh lingkungan budaya dengan memiliki kategori serta karakteristik. Pada dasarnya, karakter dari perempuan tergantung dari lingkungan dan juga hasil belajar masyarakat yang sudah mereka lihat dari lingkungan tersebut. Bukan hal mudah untuk menjadi perempuan yang hidup ditengah-tengah masa modern ini, karena sudah dari dulu perempuan selalu dikaitkan dengan petuah kodrat, yang seorang perempuan telah memiliki tugas atau sifat maupun sikap yang pantas atau tidaknya mereka lihat sebab dirinya adalah sebagai perempuan. Hal tersebut menjadi pembatasan potensi maupun pengembangan diri dari seorang perempuan secara tidak disadari.

Pendahuluan

>> Oleh karena itu presiden mengeluarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional [2]. Tujuan dari dikeluarkannya INPRES tersebut adalah untuk menutrunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap sebuah proses pembangunan.

>> Prinsip yang telah menyamakan kedudukan maupun perlakuan adil terhadap pria maupun pada perempuan, sudah tercantum didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin mengenai persmaaraan/kesetaraan antara para perempuan dan kaum laki-laki, serta juga menjadi arus utama gender yang sudah diadopsi untuk menjadi kebijakan guna mampu memberikan integrasi pada perspektif gender untuk kebijakan, penganggaran, dan juga perencanaan. UUD 1945 pasal 28 I (2) telah mengemukakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dan di dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

Pendahuluan

Beberapa asumsi mengenai perbedaan gender ada disebabkan oleh banyak sekali factor yang dapat dibentuk, diperkuat, disosialisasikan, dan juga dikonstruksi dengan secara sosial ataupun bahkan kultural melalui ajaran dari keagamaan dan juga negara. Perbedaan yang terjadi tersebut bagi masyarakat merupakan hal yang tidak perlu untuk mendapatkan perhatian sepanjang dari ranah perbedaan tersebut tetap memikirkan perdamaian serta tidak menimbulkan diskriminasi. Namun, yang terlihat di kenyataan dan hasil nyatanya adalah perbedaan gender yang sudah mempunyai perkembangan telah melahirkan berbagai masalah. Hal yang menjadi masalah utama yaitu dapat berakibat pada ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Mengenai ketidakadilan tersebut, telah termanifestasikan kedalam bentuk dari sebuah ketidakadilan, yang bisa dimulai dari marginalisasi ataupun yang dapat terjadi dari kemiskinan perekonomian, pembentukan dalam stereotipe, subordinasi atau yang dapat dikatakan sebagai anggapan yang tidak penting bagi keputusan politik, pelabelan negative, terjadinya kekerasan, beban kerja yang justru lebih bertambah, serta juga sosialisasi ideologi mengenai peran gender

Pendahuluan

Oleh sebab itu peran dan komitmen pemerintah dalam hal kesetaraan gender yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam sektor pembangunan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender guna untuk meningkatkan status dan kondisi perempuan sebagai aset pembangunan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat menjadikan perempuan mampu berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam menentukan pembangunan masa depan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mendeskripsikan peran pemerintah dalam proses mewujudkan pembangunan berspektif gender di Sidoarjo guna untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pembangunan. Oleh karena itu peran dari pemerintah khususnya pemerintah Sidoarjo diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender di Sidoarjo

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui peran daripada pemerintah Sidoarjo agar pembangunan di Sidoarjo berjalan dengan baik tanpa memandang jenis kelamin atau gender pada seseorang, agar perempuan juga dapat sejajar dengan laki-laki tanpa harus melihat status gender.

Pendahuluan

- Berdasarkan Batasan-batasan permasalahan yang diambil maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender dan bagaimana proses mewujudkan pembangunan berspektif gender di Sidoarjo.
- Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender di Sidoarjo.

Teori

Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal, yaitu :

1. peran aktif
2. peran pasif
3. peran partisipatif

Metode

Metode Penelitian

Metode pendekatan kualitatif

Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender
2. Analisis peran pemerintah menurut Soerjono Soekanto

Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling, dengan 1 *key informan*

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, serta dokumentasi

Jenis dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder

Teknik Penganalisisaan Data

Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Peran Aktif

1. dalam advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender kepada masyarakat dan pegawai pemerintahan dengan cara melakukan kegiatan atau acara dengan membawakan tema kesetaraan gender, memenuhi hak-hak ketenagakerjaan perempuan seperti hak istirahat bagi perempuan yang sedang melahirkan, keguguran, dan juga menstruasi, melindungi perempuan di instansi masyarakat maupun pegawai daerah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja, memaksimalkan potensi perempuan untuk dapat berkembang dengan jenjang karir yang sama seperti halnya laki-laki, memberikan upah yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan melibatkan perempuan dalam hal pengambilan keputusan organisasi di dalam perusahaan seperti serikat pekerja.
2. penandatanganan MOU dengan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur juna REPLIKASI Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

- **Peran Pasif**

Peran pasif pemerintah hanya mengikuti sosialisasi dan kegiatan-kegiatan acara penyuluhan saja tanpa terlibat aktif untuk melakukan sosialisasi seperti kunjungan-kunjungan di tempat-tempat lain seperti : kampus, desa, dan rumah-rumah warga. Padahal kunjungan-kunjungan tersebut sangatlah penting untuk menyampaikan pentingnya kesetaraan gender di dalam kehidupan sosial dan kurangnya penyuluhan di masyarakat mengenai kesetaraan gender mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan juga informasi masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender di seluruh aspek dan sektor pembangunan.

Peran Partisipatif

Peran partisipatif pemerintah Sidoarjo memberikan edukasi, motivasi dan mampu mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah guna untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pola pikir bermasyarakat yang adil. Pemerintah juga memberikan pelayanan maupun penyuluhan, dan juga konsultasi apabila adanya diskriminasi terhadap perempuan. Masyarakat sayangnya masih kurang mengerti dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah untuk kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator yang berguna untuk melihat adanya murid yang bersekolah di jenjang tertentu, namun berusia di luar usia normal jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Faktor Penghambat Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berspektif Gender di Kabupaten Sidoarjo

Komitmen Pimpinan, di Kabupaten Sidoarjo sendiri, dari hasil FGD diketahui bahwa masalah yang selama ini dihadapi mengapa PUG belum berjalan maksimal adalah karena masih belum berkembangnya dukungan dari para senior manajemen atau pejabat di masing-masing SKPD, kurangnya akuntabilitas pembangunan yang berbasis gender, kurangnya kapasitas internal untuk menjalankan PUG maupun untuk merekan keberhasilannya, dan terbatasnya sumber daya untuk mendukung unit gender atau staf gender yang mampu melakukan perencanaan program yang sensitif gender

problema utama yang selama ini dihadapi SKPD dan menjadi penyebab analisis gender sulit dilakukan di Kabupaten Sidoarjo adalah karena tidak atau belum adanya data yang terpilah antara perempuan dan laki-laki

KESIMPULAN

- Kesimpulan dari peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender masih kurang maksimal dalam menjalankan peranannya. Hal tersebut dibuktikan dalam menjalankan tiga peran yakni yang pertama, peran aktif pemerintah dalam melakukan penyuluhan dan juga kegiatan-kegiatan yang bertemakan kesetaraan gender dengan melakukan sosialisasi dan perlindungan kepada perempuan dalam urusan hak-hak mereka. Yang kedua, Peran pasif pemerintah adalah hanya melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam sektor pemerintah dan belum menyeluruh ke desa dan juga kampus sehingga mengakibatkan kurangnya faham masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Dan yang ketiga, peran partisipasif pemerintah dalam memberikan edukasi, motivasi dan mampu mengajak seluruh kalangan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemerintah guna untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk merubah pola pikir masyarakat yang adil. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada perempuan menjadi faktor dan juga pemicu hambatan pemerintah dalam menyukseskan peranannya dalam pencapaian dan mewujudkan pembangunan berspektif gender.
- Ada beberapa faktor penghambat dalam mewujudkan pembangunan berspektif gender di Kabupaten Sidoarjo yaitu komitmen pimpinan, kesediaan data terpilah, focal point dan problematisasi mutasi pegawai, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, serta administrasi dan ketentuan hukum.

Terima Kasih 😊